

Banalitas Kebohongan Manusia Era *Post-Truth*. Sebuah Rekonstruksi Nalar dengan Analisis Kritis Mary Douglas dan Jürgen Habermas

Oleh: Trio Kurniawan¹ - Malang

Abstract:

The *post-truth era* presents the banality of hoax with populism as its main arm. Hoax affects the social order of the society in such a way that it often creates an outcry that makes distrust among the people. Internet has become the most proper media for disseminating hoax information. *Group and Grid* theory of Mary Douglas will be used to analyze this phenomena. Critical theory of Jürgen Habermas will be used as a 'scalpel' to reconstruct human common sense in this *post-truth era* in order to promote a better social order in the society.

Keywords: *group and grid, post-truth, hoax, internet, critical theory* (Teori Kritis).

1. Pengantar

Manusia pada era ini sedang mengalami fenomena unik yaitu krisis kebenaran. Beberapa cendekiawan kemudian menyebutnya sebagai era *post-truth*; era di mana manusia tidak lagi berlomba-lomba mengejar kebenaran sejati, melainkan melahap sampah-sampah kebenaran (*hoax* atau hoaks) tanpa ditelaah terlebih dahulu. Beberapa pihak (juga dari kalangan cendekiawan) bahkan dengan bangga menjadi agen penyebaran sampah-sampah tersebut.

Jika dikaji secara lebih mendalam, persoalan lahirnya era *post-truth* merupakan persoalan yang sangat serius karena nalar manusia berupaya untuk mencari kebenaran yang sifatnya palsu. Era *post-truth* memiliki konstruksi nalar tersendiri sehingga manusia dengan mudah menggunakan konstruksi tersebut untuk menerima hoaks sebagai kebenaran. Konstruksi nalar ini tentu tidak lahir begitu saja, melainkan terbentuk dari latar belakang ekonomi-sosio-kultural dunia saat ini. Oleh karena itu, sangat penting dan mendesak untuk

1 Penulis adalah mahasiswa pascasarjana konsentrasi filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang

melakukan rekonstruksi atas nalar manusia pada era *post-truth* ini sehingga manusia bisa kembali berpegang pada kebenaran sejati, bukan pada kebohongan.

Rekonstruksi nalar manusia pada era *post-truth* ini akan dilakukan pertama-tama dengan menganalisa penyebaran hoaks di internet. Internet secara nyata sudah menjadi kebudayaan baru yang sangat kuat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan manusia saat ini. Konsep Mary Douglas tentang *group* dan *grid* digunakan untuk menganalisa akar persoalan penyebaran hoaks tersebut sehingga memengaruhi masyarakat.

Setelah menganalisa akar persoalan tersebut, rekonstruksi nalar manusia akan dilakukan dengan harapan manusia saat ini mampu menangkal penyebaran hoaks di masyarakat. Rekonstruksi nalar manusia era *post-truth* ini akan dilakukan dengan menggunakan Teori Kritis yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas.

2. Pengertian *Post-Truth*

Penyebaran hoaks yang merajalela beberapa tahun belakangan menunjukkan kenyataan yang sangat mengerikan berkaitan dengan eksistensi manusia sebagai subjek yang mencintai dan mengejar kebenaran. Setidaknya ada beberapa momentum yang menunjukkan kendali era *post-truth* terhadap kehidupan manusia secara global maupun nasional (konteks Indonesia). Kamus Oxford menempatkan kata *post-truth* sebagai “Word of The Year” pada tahun 2016 (<https://en.oxforddictionaries.com>). Karena kata tersebut begitu banyak digunakan oleh umat manusia, terlebih pada peristiwa terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat dan keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (Brexit). Pada kedua momen itu, berita hoaks dengan sangat mudah disebarkan kepada masyarakat luas dan memengaruhi opini publik.

Indonesia sendiri mengalami dampak buruk dari era *post-truth*. Tanpa mengabaikan penyebaran hoaks pada masa sebelumnya, gempuran informasi hoaks bertaburan di media sosial selama 3-4 tahun terakhir, terutama ketika pilpres 2014 dan pilkada Jakarta 2015. Rakyat terpecah menjadi kubu-kubu yang saling serang hanya berdasarkan informasi bohong. Kerukunan antar umat beragama semakin renggang. Isu-isu sensitif dengan mudah “digoreng” hanya demi syahwat politik kekuasaan. Puncaknya adalah penangkapan organisasi Saracen (<http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41022914>) dan Muslim Cyber Army (MCA) yang dilakukan oleh aparat kepolisian beberapa waktu yang lalu. Polri sendiri dengan tegas mengatakan bahwa penangkapan anggota organisasi MCA memiliki pengaruh langsung terhadap penurunan jumlah berita

hoaks mengenai penyerangan ulama. (<http://news.liputan6.com/read/3344852>).

Kamus Oxford menjelaskan *post-truth* sebagai kata sifat di mana kebenaran objektif tidak lagi berpengaruh terhadap pembentukan opini publik, melainkan situasi emosional ataupun kepercayaan personal manusia (<https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth>). Manusia yang berada dalam cengkeraman era *post-truth* tidak lagi merasa bahwa kebenaran objektif begitu penting dan harus dikejar. Mereka tidak lagi berupaya keras menggali informasi, membandingkan setiap informasi yang diperoleh dan mengambil keputusan yang tepat mengenai informasi tersebut berdasarkan logika yang jernih. Manusia pada era *post-truth* lebih mudah terbuai pada berita-berita yang mengguncang emosional mereka sehingga mempercayai berita tersebut sebagai kebenaran sejati tanpa harus repot untuk menelaahnya terlebih dahulu.

Steve Tesich adalah orang pertama yang menggunakan istilah *post-truth*. Ia menggunakan istilah tersebut dalam artikelnya *The Government of Lies* di majalah *The Nation* yang terbit pada tanggal 6 Januari 1992 (Tesich, 1992: 12-13). Ia mengambil latar belakang Skandal Watergate Amerika (1972-1974) maupun Perang Teluk Persia untuk menunjukkan situasi masyarakat pada saat itu yang tampaknya “nyaman” hidup dalam dunia yang penuh kebohongan. Ia melihat bahwa masyarakat tidak terlalu peduli dengan sekelumit kebenaran yang ditegakkan dan dengan bebas memilih untuk hidup pada ruang *post-truth*.

Ralph Keyes, dalam bukunya *The Post-Truth Era*, mengatakan bahwa pada zaman sekarang, kebohongan jauh lebih banyak mempengaruhi kehidupan manusia dibandingkan apapun (Keyes, 2004:15). Manusia modern lebih nyaman hidup dalam kebohongan dibandingkan bersusah-payah menemukan kebenaran. Kebohongan telah menjadi cara hidup mereka. Maka menurut Ralph Keyes, tidak lama lagi kebohongan akan menjadi sesuatu yang lumrah, bukan sesuatu yang tabu. Berbohong justru akan menjadi lebih menantang, menggiurkan dan lebih menghasilkan uang daripada kebenaran.

Singkatnya, era *post-truth* adalah era di mana manusia hidup di dalam kebohongan dan menganggap hal tersebut tidak lagi sebagai masalah besar. Bisa dikatakan bahwa era *post-truth* melahirkan suatu banalitas kebohongan yang membuat akal budi manusia kesulitan untuk melihatnya secara jelas. Ruang publik masyarakat modern yang menjadi tempat manusia hidup tidak lagi kondusif untuk menyingkirkan kebohongan dan memeluk kebenaran. “Cakar” era *post-truth* semakin lama semakin kuat tertanam dalam diri setiap manusia tanpa batas negara ataupun kebudayaan, terlebih karena penyebarannya dibantu lewat media sosial dan internet.

3. Konstruksi Nalar Manusia pada Era *Post-Truth* dan Dampaknya

Persoalan utama yang menjadi fokus era *post-truth* adalah banalitas kebohongan yang merasuki pelbagai sendi kehidupan manusia, secara khusus pada bidang kebijakan publik dan politik elektoral. Penyebaran informasi *hoax* yang bertujuan untuk mempengaruhi persepsi publik terhadap bidang-bidang tersebut dijadikan sebagai strategi agar tujuannya dapat tercapai. Nalar manusia yang sudah dimanipulasi oleh informasi-informasi *hoax* tersebut selanjutnya akan menuntun setiap tindakan atau ucapan manusia itu sesuai dengan skema yang diharapkan oleh “otak” penyebaran *hoax*.

Konstruksi nalar manusia era *post-truth* ini sejatinya “unik” dalam hal mencari dan merumuskan kebenaran. Kebenaran sejati yang dimaksudkan dalam era *post-truth* tampaknya adalah kebenaran yang sesuai dengan emosi sosial. Artinya, sejauh sesuatu dianggap dapat menggerakkan emosi publik, sesuatu itu dapat dianggap sebagai kebenaran; tidak peduli lagi dari mana segala informasi itu berasal atau bagaimana informasi itu dimodifikasi sehingga bersifat “abu-abu” atau malahan berlawanan dengan fakta.

Menguatnya banalitas kebohongan yang mempengaruhi emosi sosial sebagai puncak dari kebenaran masyarakat era *post-truth* tampaknya *gandeng* dengan mencuatnya populisme sebagai wadah pemersatu antar kelas/golongan dalam masyarakat. Definisi yang tetap mengenai populisme agaknya cukup sulit dirumuskan. Namun, secara sederhana, populisme bisa didefinisikan sebagai posisi politis yang menempatkan “rakyat” berlawanan dengan “kaum elit” (Mudde, 2004:542–563). Terminologi “rakyat” ini juga masih bisa didefinisikan ke dalam banyak cakupan, misalnya berdasarkan agama, suku, status sosial-ekonomi dan lain sebagainya. Singkatnya, banalitas kebohongan yang menguat pada era *post-truth* seringkali menggunakan “rakyat” sebagai objeknya.

Penyebaran *hoax* yang bertujuan untuk mempengaruhi emosi sosial menempatkan rakyat kebanyakan sebagai objeknya. Tujuannya sederhana: masyarakat era *post-truth* yang secara psikologis mudah melekatkan diri kepada kelompok sosial tertentu yang berlawanan dengan kaum elit akan teguh mengikuti keyakinan mayoritas di mana mereka berdiri. Persoalan uji kesahihan informasi yang beredar tidak lagi dianggap sebagai hal yang harus dilakukan. Kebenaran mayoritas (walaupun tidak sesuai fakta) dianggap sebagai kebenaran sejati.

Hoax sebagai “senjata” utama era *post-truth* pada hakekatnya berkaitan dengan bahasa dan simbol sebagai media komunikasi antar manusia. Pada masa sebelum modernitas dan teknologi internet digunakan oleh manusia,

penyebaran berita *hoax* bisa dilakukan lewat perbincangan sehari-hari ataupun lewat koran atau majalah. Pada masa ini, pola penyebaran berita *hoax* jauh lebih “liar” dan tak terkontrol karena penggunaan internet dan media sosial lainnya.

Komunikasi yang sejatinya dilakukan manusia agar segala bentuk pengetahuan dan kebenaran yang berguna dalam tata hidup bersama bisa disampaikan, dalam era *post-truth*, justru digunakan sebagai sarana untuk mempengaruhi persepsi publik. Komunikasi antar manusia tidak terjadi dalam disposisi yang setara, kritis, jujur dan penuh tanggung jawab. Mayoritas masyarakat berbicara dengan kepentingan tertentu yang sifatnya mengobjektifikasi lawan bicaranya.

Konstruksi nalar pada era *post-truth* ini juga semakin “unik” karena metodologi pengujian pengetahuan tidak lagi diperlukan. Nalar manusia ditumpulkan karena sudah dipengaruhi oleh emosi sosial. Karl Gustav Jung menyebut fenomena ini sebagai “kerasukan kolektif” atau “epidemi psikis”. Akal budi tidak lagi berupaya membanding-bandingkan pengetahuan ataupun melakukan falsifikasi *a la* Karl Popper. Segala macam informasi yang ramai dibicarakan di media sosial sepertinya “sudah cukup” untuk dianggap sebagai kebenaran.

Dalam perspektif epistemologi, fenomena ini tentu sangat mengerikan. Nalar manusia tunduk pada banalitas kebohongan. Pengetahuan dijadikan sarana pemenuhan kepentingan elit yang tidak memikirkan dampak buruk penyebaran *hoax* dalam tata hidup bersama.

Dampak penyebaran berita hoaks di masyarakat ini sungguh terasa. Perpecahan dan sikap saling curiga menghantui relasi antar kelompok masyarakat. Sebagai contoh, tindakan penyebaran berita hoaks oleh *Muslim Cyber Army* (MCA). Ada banyak berita-berita mengenai motif, aktivitas dan dampak dari penyebaran hoaks di Indonesia yang sudah diulas di beberapa media *mainstream*. Salah satu motif yang dirasa kuat mempengaruhi perilaku penyebar hoaks ini adalah motif ekonomi dan politik (<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43221362>). Dan Saracen di Indonesia cukup banyak memengaruhi cara berpikir dan perilaku masyarakat. Pembangkitan isu kemunculan Partai Komunis Indonesia (PKI) hingga pengeroyokan ulama Islam membuat masyarakat jadi saling tuduh dan menjaga jarak.

Sentimen rasialis juga semakin menguat beberapa tahun belakangan karena isu Tenaga Kerja Asing yang menyerbu Indonesia. Kelompok TKA China yang kerap kali menjadi “korban” dari isu tersebut. Akibatnya, pandangan sinis dan penuh kebencian terhadap penduduk Tionghoa sangat kuat menyebar di Internet.

Para penyebar berita hoaks ini juga secara gencar melakukan *framing* terhadap fenomena-fenomena tertentu. Dalam satu kasus ulama yang terkena beberapa tuntutan pidana sekaligus, *framing* yang dikerjakan oleh para penyebar hoaks di internet ini adalah kriminalisasi ulama. Padahal, kasus pidana tersebut belum diselesaikan sama sekali. Artinya, belum ada usaha untuk membuktikan ulama tersebut terbukti bersalah atau tidak secara yuridis, namun sudah muncul *framing* kriminalisasi. Secara psikologis, kinerja aparat hukum mungkin saja sangat terganggu karena gerakan massa cukup besar di perkotaan ketika kasus ini mencuat. Apalagi wilayah kerja aparat hukum ketika menangani kasus ini beririsan dengan ranah agama, ranah yang sensitif.

Singkatnya, persoalan penyebaran berita hoaks bukanlah hal yang sederhana dan *remeh*. Persoalan ini sangat serius karena berdampak pada konstruksi nalar manusia Indonesia. Selain itu, rusaknya tata hidup bersama secara perlahan akibat gencarnya penyebaran berita semacam itu sangat perlu dan mendesak untuk diperbaiki.

4. Pandangan Mary Douglas tentang Kebudayaan

Mary Douglas (Wuthnow et al., 1984) merupakan salah satu antropolog yang dipengaruhi langsung oleh pemikiran Durkheim. Durkheim membagi kelompok masyarakat menjadi 2 yaitu, masyarakat primitif (solidaritas mekanis, ikatan kekeluargaan) dan masyarakat modern (solidaritas teknis, pembagian kerja) (<http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4439-M1.pdf>).

Durkheim mengatakan bahwa hanya pada masyarakat primitif terdapat kesadaran kolektif atau hati nurani bersama, masyarakat modern tidak. Ini ditentang oleh Douglas. Douglas mengerti apa yang Durkheim bayangkan, yaitu bahwa ada basis sosial untuk pemikiran manusia dan basis ini ia gunakan justru untuk memahami sistem kepercayaan masyarakat modern. Bagi Douglas, masyarakat modern pun tidak terlepas dari sistem, kebiasaan dan pikiran yang seringkali tidak disadari. Ia menyebutnya sebagai bias budaya.

Selain dipengaruhi oleh Emile Durkheim, Mary Douglas juga dipengaruhi oleh teori strukturalisme. Pengaruh Strukturalisme dalam pemikiran Mary Douglas pada dasarnya tidak sebesar pengaruh Durkheim. Namun, Douglas sendiri mengakui cara pikir kaum strukturalis yang melihat realitas sebagai kumpulan “simbol-simbol yang terorganisir” dan memancing setiap orang untuk menginterpretasikannya (Wuthnow et al., 1984: 82-83).

Secara umum, dalam pendekatan strukturalisme sebuah realitas dipandang sebagai sebuah struktur yang terdiri dari unsur-unsur yang saling terjalin dan

kemudian membangun teks sebagai sebuah keutuhan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa analisis struktural bertujuan untuk membongkar dan memaparkan secermat, seteliti, semendetail, dengan sedalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua aspek fenomena budaya yang pada akhirnya secara bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh. Beberapa tema penting dalam kajian Mary Douglas tentang kebudayaan adalah konsepnya tentang polusi dan tata moral manusia, beban-beban simbolik dan situasi marjinal serta bahasa dan ritual.

Polusi dan Tata Moral Manusia

Pandangan Douglas tentang tata aturan moral (Wuthnow et al., 1984: 84-91) dimulai dari persoalan sampah/kekotoran. Ada persoalan besar yang tampaknya dilihat oleh Douglas ketika berbicara mengenai kekotoran itu sendiri: tangan disebut kotor ketika tangan itu harus dicuci, atau sepatu itu kotor karena kita memang melihat sepatu yang kotor. Pertanyaannya: mengapa sesuatu disebut kotor? Mengapa makanan yang jatuh ke lantai terlihat lebih kotor dibandingkan makanan yang ada di keranjang? Mengapa sepatu berlumpur terlihat lebih kotor ketika berada di lantai bersih dibandingkan ketika berada di tanah?

Dari contoh di atas, jelas bahwa persoalan kekotoran bukanlah persoalan kotor itu sendiri melainkan persoalan “tempat”. Namun, Douglas memberikan penekanan yang jauh lebih mendalam. Ia meyakini bahwa ada tata moral yang justru sedemikian rupa mengatur realitas sehingga terklasifikasi ke dalam sistem-sistem berpikir/sistem sosial. Faktor dimensi moral yang menyebabkan orang selalu berpikir bahwa makanan seharusnya berada di piring, bukan di meja atau di lantai.

Dengan demikian, kekotoran juga bisa disejajarkan dengan kejahatan. Tata moral yang sedemikian lama mengatur kognitif manusialah yang bisa saja menyebabkan sesuatu itu disebut jahat pada komunitas sosial tertentu, namun bisa saja bukanlah jahat di komunitas yang lain. Singkatnya, analisis Douglas mengatakan bahwa keliru untuk memahami sesuatu itu berada di luar tempatnya karena itu kotor, melainkan sesuatu itu kotor karena berada di luar dari tempat/konteksnya.

Di bagian awal sub-tema ini juga sudah ditunjukkan keterbatasan Durkheim dalam membawa persoalan kesadaran kolektif kepada cara hidup masyarakat modern. Namun, Douglas mengkritisi hal tersebut karena baginya masyarakat modern pun memiliki apa yang disebut dengan kesadaran kolektif. Jika masyarakat primitif membangun kesadaran kolektif dalam ritus kepercayaan dan adat istiadat, masyarakat modern membangun kesadaran kolektif dengan

cara yang berbeda. Masyarakat modern tidak terlalu peduli dengan Tuhan dan hal-hal transenden lainnya.

Douglas mengambil contoh mengenai kepedulian global terhadap polusi lingkungan hidup. Pada mulanya, krisis lingkungan hidup ini adalah persoalan sektarian/lokal. Namun, Douglas melihat kemunculan kesadaran kolektif masyarakat modern untuk menjadikan krisis lingkungan hidup ini sebagai permasalahan bersama, permasalahan global. Pada titik inilah Douglas menyadari bahwa masyarakat modern membangun kesadaran kolektif lewat hal-hal pokok yang menarik perhatian mereka, terlebih jika hal tersebut dapat mempengaruhi tata hidup bersama.

Beban-Beban Simbolik dan Situasi Marjinal

Pemikiran Douglas mengenai kekotoran/polusi menyentuh juga pada beban-beban simbolis (Wuthnow et al., 1984: 97-99) yang dirasakan oleh setiap orang. Secara sederhana, bisa dikatakan bahwa manusia (dalam komunitas sosialnya) selalu dipengaruhi oleh tata moralnya. Seseorang mungkin menyebut ini sebagai stigma, bahwa sesuatu harus dibuat seperti A karena ia adalah A. Di luar A, sesuatu itu bisa saja keliru/salah.

Dengan logika ini, bisa dikatakan bahwa setiap manusia akhirnya hidup dalam beban-beban simbolisnya. Karena ia lulusan UI, ia harus berbuat seperti UI dan tidak boleh di luar UI. Logika ini juga mengandaikan bahwa ketika ada orang yang berada di luar komunitas sosial yang “seharusnya” berarti orang tersebut bisa saja disingkirkan (bandingkan kasus-kasus feminisme).

Bahasa dan Ritual

Bagi Douglas, ritual (Wuthnow et al., 1984: 102-110) yang dilakukan oleh manusia primitif ataupun modern adalah suatu bentuk yang kelihatan dari tindakan berkomunikasi. Ritual adalah bahasa yang memiliki bentuk kelihatan. Ritual membawa di dalamnya pengetahuan/informasi kolektif yang salah satunya adalah bahasa. Namun, tak bisa diabaikan begitu saja bahwa bahasa sendiri bertindak seperti sebuah ritual (karena memiliki struktur/ritusnya).

Douglas mengajukan preposisi bahwa semakin tinggi tingkat solidaritas dalam suatu kelompok, maka bahasa simbolik yang digunakan semakin terbatas. Sebaliknya, semakin rendah tingkat solidaritas suatu kelompok, bahasa simbolik yang digunakan semakin berkembang.

5. Konsep Mary Douglas tentang *Group* dan *Grid*

Mary Douglas menyadari bahwa *entah* bagaimanapun perubahan yang terjadi dalam masyarakat (dari primitif ke modern atau bentuk lainnya lagi), tetap ada satu hal yang menyatukan mereka sebagai masyarakat. Ia menyebutnya sebagai kesadaran kolektif. Kesadaran inilah yang menjadi identitas dari suatu kelompok masyarakat.

Konsep *group and grid* pertama-tama tidak membahas soal kesadaran kolektif dalam kelompok masyarakat. Konsep ini pada dasarnya ingin menunjukkan secara jelas *set of rules* dari masing-masing kelompok masyarakat sehingga tampak perbedaan dan pembedaannya. *Set of rules* ini menjadi semacam batasan-batasan tentang apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam suatu kelompok. Jika ada anggota masyarakat yang bertindak di luar batasan, ia bisa saja dikeluarkan dari kelompok tersebut.

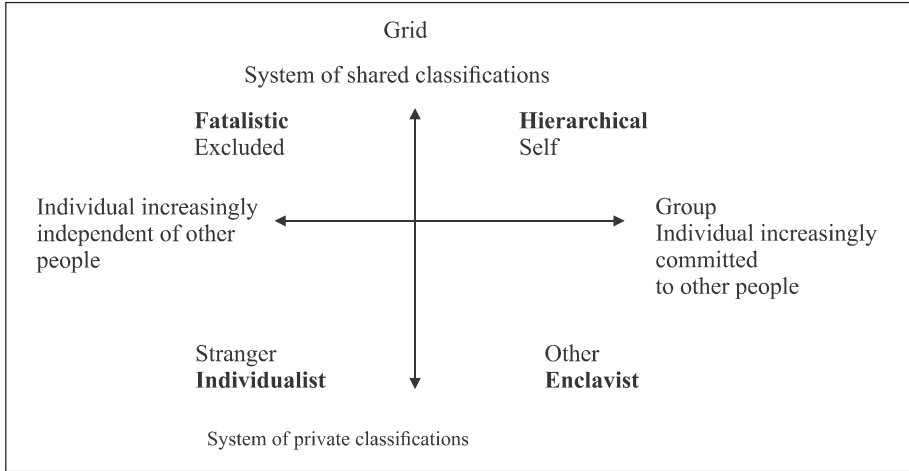
Konsep ini juga akan bermuara pada pembagian karakter dari masing-masing kelompok masyarakat. Dengan pembagian (klasifikasi) ini, analisa terhadap suatu masyarakat akan semakin dipermudah. Mary Douglas sendiri menggunakan pembagian yang ia ciptakan sebagai upaya untuk melihat keunikan dan bias dalam masyarakat.

Pandangan Mary Douglas tentang kebudayaan, sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam sub-bab sebelumnya, merupakan buah dari kajiannya tentang klasifikasi sosial dalam masyarakat dan kosmologi maupun nilai-nilai sosial yang berkembang di dalamnya (Douglas, 1970). Cara untuk mengamati fenomena ini sebenarnya cukup mudah. Sebagai contoh, cara dan sistem hidup masyarakat perkantoran dengan orang-orang di pedesaan yang hidupnya bertani tentu berbeda. Menurut Douglas, perbedaan ini didasarkan pada ada atau tidaknya hierarki dan kuat atau lemahnya ikatan sosial yang ada di dalam kelompok masyarakat tersebut.

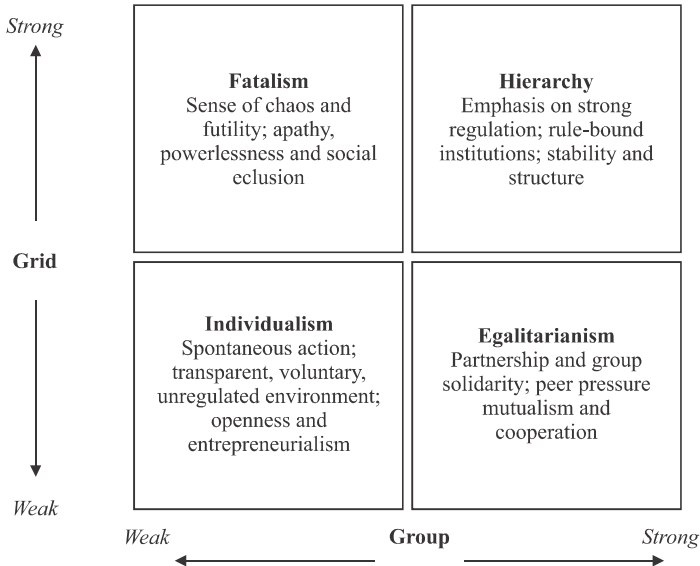
Apa itu *group* dan *grid*? *Group* bisa dimengerti sebagai kekuatan dalam suatu kelompok yang membentuk identitas kelompok tersebut. *Group* membuat manusia tahu siapa kelompoknya dan bagaimana kelompoknya berbeda dengan kelompok yang lain. Pertanyaan yang menggambarkan *group* adalah *who am I?*

Grid secara sederhana bisa dipahami sebagai batasan-batasan atau aturan yang menjadi fondasi kelompok tersebut. Dengan adanya *grid*, manusia yang terintegrasi di dalam suatu *group* bisa bertindak sesuai aturan atau batasan yang diberikan kepadanya. Pertanyaan yang menggambarkan *grid* adalah *what tells me how to behave* (apa dasar tindakan saya)?

Berikut ini akan disajikan bagan sederhana yang bisa menggambarkan bagaimana *group* dan *grid* bisa memetakan kelompok sosial masyarakat:



Gambar 1.



Gambar 2.

Pada masyarakat *high grid – low group (fatalism)*, aturan-aturannya sangat kuat namun identitas sosialnya lemah. Ikatan identitas tidak kuat sehingga berkarakter apatis. Pola ini tampak pada masyarakat yang berkarakter

birokratis. Pada masyarakat *low grid – low group*, identitas dan aturan-aturannya sangat lemah sehingga karakter yang muncul adalah individualistik. Pola ini tampak pada masyarakat “pasar”. Tidak ada aturan yang mengikat dan ditata berdasarkan hukum pertukaran. Tidak ada identitas kolektif (Sutrisno dan Putranto, eds., 2005:94).

Pola *low grid – high group* tampak pada masyarakat sektarian. Mereka kuat dalam ikatan identitas namun tidak terpaku pada aturan-aturan baku kelompok. Orang yang berada di luar identitas mereka benar-benar dianggap sebagai “yang lain. Mereka hidup secara egaliter. Terakhir, pola *high grid – high group* paling tampak dalam masyarakat militer Jepang. Mereka berpegang teguh pada identitas kelompok dan aturan-aturan yang ditetapkan untuk menjaga kelompok tersebut. Sistemnya hierarkis dan cenderung tidak toleran.

6. Teori Kritis Jürgen Habermas

Jürgen Habermas merupakan salah seorang filosof kontemporer terbesar yang karya-karyanya banyak bergerak di bidang teori-teori sosial dan komunikasi. Buah pemikirannya banyak mempengaruhi ilmu pengetahuan dan kehidupan praktis manusia dewasa ini. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh gagasan-gagasan kiri’, terutama karena ia sendiri dibesarkan dalam Mazhab Frankfurt.

Dalam bukunya, *Knowledge and Human Interests* (Habermas, 1971), Habermas mengatakan bahwa pengetahuan yang sejati merupakan pengetahuan yang mengarah pada *societas* (masyarakat). Pengetahuan tidak akan ada gunanya jika tidak berguna bagi masyarakat dan kebudayaan manusia. Habermas mengkritisi Karl Marx yang mereduksi refleksi filosofis (pengetahuan) kepada perkara kerja. Marx mengkerdikan proses refleksi pengetahuan manusia pada tataran tindakan instrumental (*instrumental action*) (Habermas, 1971: 43-44).

Pengetahuan, bagi Habermas, merupakan soal kepentingan. Tidak ada pengetahuan tanpa adanya kepentingan. Hal ini ia tegaskan sebagai bentuk kritiknya atas Positivisme Logis yang mempengaruhi cara pikir masyarakat modern. Positivisme Logis meyakini bahwa tidak ada peran manusia sebagai subjek penahu dalam produk pengetahuan. Pengetahuan haruslah bersifat netral dan objektif murni.

Habermas tentu saja menolak disposisi pengetahuan semacam itu. Manusia sebagai subjek yang memproduksi kebenaran pengetahuan tentu tidak dapat dipisahkan dari kebenaran pengetahuan itu sendiri. Artinya, pengetahuan

sebagai produk akal budi manusia selalu beririsan dengan intensi dari manusia itu sendiri. Ketika sebuah pengetahuan dihasilkan dalam relasi antara subjek dan objek, sungguh sangat tidak masuk akal ketika ada konsep yang mengatakan bahwa pengetahuan tersebut bebas dari subjek. Dengan kata lain, selalu ada kepentingan di balik setiap pengetahuan yang diproduksi oleh akal budi manusia(Kurniawan, 2016).

Pengetahuan, bagi Habermas, hanya menjadi nyata dalam bahasa. Itu sebabnya ia menekankan peran penting bahasa dalam proses rasionalisasi masyarakat. Rasionalisasi masyarakat ini, oleh Habermas, disebut dengan tindakan komunikatif. Dalam tindakan komunikatif, antar subjek dalam ruang publik saling berkomunikasi, melakukan diskursus dan merumuskan konsensus. Ia meyakini bahwa segala macam tindakan sosial (konflik, kompetisi) merupakan turunan dari tindakan yang terarah pada pencapaian akan pemahaman(Habermas, 1979:1).

Masyarakat yang ideal dalam pandangan Habermas adalah masyarakat yang di dalamnya setiap orang mampu mengedepankan sebuah perbincangan yang rasional dan bebas dari determinasi penguasa. Masyarakat semacam ini disebut sebagai masyarakat yang emansipatoris. Di dalamnya setiap orang bebas mengeluarkan argumen atau gagasan yang rasional. Tujuan akhir dari diskursus adalah apa yang disebut dengan persetujuan (*agreement*) konsensus. Konsensus tercipta ketika masing-masing subjek telah berbagi pengetahuan dan terhubung satu dengan yang lainnya lewat konsensus tersebut.

Jürgen Habermas menyadari bahwa pengetahuan sangat mungkin ditunggangi oleh kepentingan ideologis pribadi tertentu. Itu sebabnya ia mendesak pentingnya kritik ideologi. Tahapan atas kritik ideologi itu meliputi: deskripsi dan interpretasi atas situasi tertentu, melakukan penalaran terhadap hasil deskripsi dan interpretasi, melakukan diskursus untuk menyusun agenda agar situasi berubah (terutama jika ternyata ada ideologi subjektif yang terlacak) dan evaluasi atas situasi egaliter baru yang terwujud(Morrison dan Habermas dalam Joy A. Palmer, ed.2010: 349).

Singkatnya, dalam ruang publik (masyarakat) pengetahuan dirumuskan dalam diskursus dan mendapat legitimasinya lewat konsensus. Ruang publik Habermasian ini merupakan ruang publik yang egaliter dan emansipatoris. Semua berada dalam tataran yang sama dan berhak untuk menyuarakan nalar kritisnya demi kebaikan bersama. Segala macam pengetahuan baru mendapat ruang dalam masyarakat yang demokratis-deliberatif semacam ini, namun dengan syarat utama, yaitu harus lulus dari kritik ideologi yang dilakukan secara bersama-sama agar diperoleh pengetahuan sejati.

7. Analisis Kebudayaan pada Masyarakat *Post-Truth*: Perspektif Mary Douglas

Masyarakat *post-truth* adalah kelompok masyarakat yang berkembang ketika internet (*cyberworld*) merasuki setiap sendi kehidupan masyarakat. Internet menyentuh hampir keseluruhan bidang yang dulunya dikelola secara konvensional. Internet juga berhasil menjadikan masyarakat dunia yang dulu terpisah secara geografis hingga etnis menjadi satu masyarakat global. Dalam masyarakat global tersebut, kebudayaan dan ideologi melebur jadi satu. Bahkan dalam beberapa pembicaraan, internet sudah menjadi semacam “nadi” dalam kehidupan bermasyarakat saat ini.

Penyebaran berita hoaks merupakan salah satu fenomena yang muncul dari keberadaan internet. Faktanya, penyebaran berita hoaks sudah terjadi sejak internet belum lahir. Kasus *Watergate* era Presiden Nixon menjadi bukti penggunaan hoaks sebelum internet yang dampaknya sangat besar terhadap sistem sosial-politik Amerika hingga hari ini. Namun, tak bisa dilupakan juga bahwa justru pada masa inilah (ketika internet merajai kehidupan manusia) hoaks berkembang dengan sangat pesat.

Pertanyaan untuk memulai analisis ini sebenarnya sederhana: mengapa internet menjadi media yang sangat mudah untuk menggerakkan penyebaran hoaks? Dari pertanyaan dasar itu, muncul beragam pertanyaan lainnya, seperti sistem “bermasyarakat” macam apa yang digunakan dalam dunia internet sehingga memudahkan penyebaran hoaks? Apakah dalam dunia internet masyarakatnya memiliki identitas dan aturan main yang jelas?

Ketika percampuran budaya dan ideologi terjadi di dunia akibat penggunaan internet, manusia hari ini sangat sulit untuk mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok sosial tertentu. Internet menjadikan manusia tidak lagi dengan mudah terikat pada suatu identitas, terlebih jika ada gagasan lain yang lebih menarik dibandingkan dengan identitas kelompok yang ia ikuti sebelumnya. Manusia cenderung memilih untuk menjadi pribadi yang bebas dibandingkan harus terikat pada kelompok. Dengan kata lain, dunia internet menawarkan suatu *group* yang lemah (*low*).

Bagaimana dengan *grid* dari masyarakat internet? *Grid* pada masyarakat internet juga rendah karena “aturan main” yang ada pada internet tidak jelas. Di Indonesia sendiri aturan penggunaan internet memang diatur dalam UU ITE. Namun, UU tersebut sering dilanggar dan sangat sulit untuk melacak pelanggarannya karena terlalu *massive* dan “kelincahan” para pengguna internet untuk lolos dari jeratan UU ITE. Singkatnya, *grid* dalam dunia internet juga lemah (*low*).

Masyarakat internet adalah masyarakat *low grid – low group* yang berkarakter individual dan *market oriented*. Karena itu, bisa dimengerti alasan informasi hoaks dapat menyebar dengan pesat dalam masyarakat internet. Dari segi identitas, para penyebar berita hoaks tidak merasa ada kepentingan mendesak untuk menjaga integritas bangsa ketika mereka menyebarkan informasi tersebut. Dari sisi aturan, UU ITE pun tidak 100% mampu meng-cover persoalan di internet. Para penyebar hoaks hanya peduli pada persoalan uang: berapa keuntungan finansial yang mereka peroleh dari penyebaran berita tersebut.

Penyebaran hoaks juga menjadi tidak terkontrol karena masyarakat meyakini bahwa kebohongan tidak lagi bisa diadili secara “hitam-putih”. Kebohongan yang dalam masyarakat tradisional dianggap sebagai polusi justru menjadi relatif dalam tata masyarakat modern karena adanya kepentingan politik dan ekonomi.

8. Rekonstruksi Nalar Manusia pada Era *Post-Truth*

“Internetisasi” segala macam aspek kehidupan manusia pada saat ini memiliki dampak yang cukup serius pada cara manusia dalam menerima kebenaran. Sebelum dunia dikepung oleh kekuatan internet, informasi mengenai pengetahuan merupakan hal yang sangat mahal dan sulit untuk ditemukan. Itulah sebabnya manusia pada masa sebelum internet berlomba-lomba mencari kebenaran pengetahuan tersebut dengan cara saling menguji dan mengkritisi. Manusia pada masa sebelum internet mengejar kebenaran pengetahuan sebagai sesuatu yang “mahal”.

Setelah internet hadir, bukan manusia yang mengejar informasi mengenai pengetahuan melainkan informasi tersebut yang “datang” kepada manusia. Penemuan informasi dan pengetahuan baru menjadi begitu instan dan mudah. Akibatnya, manusia cenderung abai dalam memilah-milah informasi tersebut. Nalar kritis manusia “dimandulkan” oleh segala macam kemudahan yang ditawarkan oleh internet. Apakah suatu informasi itu *hoax* ataupun benar tidak lagi menjadi perhatian manusia. Hal yang dipedulikan manusia berkaitan dengan informasi tersebut adalah seberapa jauh informasi tersebut *viral* dan dibicarakan oleh banyak orang.

Nalar kritis manusia harus ditegakkan lagi pada masa ini, terlebih ketika *hoax* berhasil memporak-porandakan banyak sendi kehidupan manusia. Rekonstruksi nalar manusia pada era *post-truth* pada dasarnya berkaitan dengan penggunaan lagi nalar kritis manusia untuk merumuskan kebenaran

sejati. Nalar kritis ini dibangun dengan kemampuan manusia untuk bertanya dan memetakan informasi-informasi yang beredar di internet.

Rekonstruksi nalar kritis manusia ini juga berkaitan dengan cara manusia melihat internet, media sosial ataupun media massa *online*. Banyak orang merumuskan internet sebagai suatu realitas, atau di banyak kajian digunakan istilah *hyper-reality*. Akibatnya, banyak orang merasa bahwa media sosial *online* merupakan komunitas global di mana manusia berinteraksi dan juga saling membentuk persepsi. Meledaknya “bom isu” di media sosial terhadap satu persoalan akan membentuk persepsi publik dalam kesehariannya di luar internet karena manusia yang berselancar di media tersebut meyakini bahwa itulah yang benar terjadi.

Internet dan media sosial atau media *online* bukanlah realitas. Dalam perspektif Heideggerian (Heidegger, 1927; Heidegger, 1954), semua hal tersebut hanyalah sarana yang membantu pekerjaan dan kehidupan manusia. Internet adalah teknologi yang sifatnya hanyalah “perpanjangan tangan” manusia. Tentu sangat lucu ketika hal yang sebatas “perpanjangan tangan” ini kemudian dianggap sebagai realitas.

Konsekuensinya, internet sebagai media paling “bombastis” untuk menyebarkan *hoax* ataupun informasi lainnya haruslah diletakkan sebagai salah satu sumber kebenaran pengetahuan. Informasi yang *viral* di internet bukanlah satu-satunya kebenaran. Karena itu informasi tersebut harus diuji kesahihannya.

Teori Kritis yang dirumuskan oleh Jürgen Habermas merupakan salah satu teori yang tepat digunakan dalam konteks ini. Bagaimana metodologinya? Informasi yang beredar di internet pertama-tama harus dideskripsikan dan diinterpretasikan dengan benar terlebih dahulu. Mendeskripsikan informasi di internet artinya mengenal batasan-batasan informasi tersebut. Menginterpretasi informasi artinya menangkap makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh informasi yang bersangkutan.

Selanjutnya, manusia harus mempelajari informasi tersebut, melihat konteksnya dan menemukan inti dari informasi yang dideskripsikan. Inilah inti dari proses kedua yaitu penalaran. Pada tahapan ketiga, hasil penalaran tersebut harus dibandingkan atau didikursuskan dengan fakta-fakta lain yang mungkin diperoleh dari manusia-manusia lainnya. Manusia harus mengkritisi setiap data atau informasi yang diperoleh sehingga ditemukan keasliannya.

Pada tahapan terakhir, manusia kemudian merumuskan hal yang menjadi pengetahuan bersama mengenai fenomena yang diinformasikan. Dalam tahap inilah konsensus mengenai pengetahuan yang sejati dirumuskan. Peran serta

subjek/manusia lain dalam metodologi kritis ini adalah untuk menguji sejauh mana informasi dapat dipercaya dan dirumuskan sebagai kebenaran sejati.

9. Simpulan

Rekonstruksi nalar manusia pada era *post-truth* bukanlah pekerjaan yang mudah karena hal ini berkaitan dengan kesadaran dan penyadaran bersama. “Racun” kemudahan yang ditawarkan oleh internet tampaknya sudah begitu kuat merasuki kehidupan manusia pada masa ini. Keduanya hampir sulit dipisahkan. Hal ini tampak dengan jelas lewat analisis kebudayaan yang dilakukan dengan menggunakan gagasan Mary Douglas.

Rekonstruksi nalar yang ditegaskan dalam artikel ini tidak bermaksud untuk menjauhi modernitas dan kemajuan yang ditawarkan oleh teknologi. Tulisan ini pada dasarnya merupakan bentuk penyadaran yang sangat mendesak diperlukan, terlebih karena banalitas kebohongan yang berkembang di masyarakat sampai hari ini.

Rekonstruksi nalar ini menjadi tugas setiap orang yang peduli terhadap kebenaran sejati. Setiap orang diajak untuk mampu melihat internet dan media sosial lainnya sebagai teknologi yang sifatnya membantu kehidupan manusia. Pada akhirnya, informasi yang keluar dari teknologi semacam itu juga harus dikritisi dan “ditelanjangi” sehingga manusia bisa menikmati kebenaran yang sejati.

DAFTAR PUSTAKA

- Douglas, Mary (1970), *Natural Symbols: Explorations in Cosmology*. London: Rotledge.
- Habermas, Jürgen (1971), *Knowledge and Human Interests*, trans. Jeremy J. Saphiro. London: Beacon Press.
- Habermas, Jürgen (1979), *Communication and the Evolution of Society*, trans. Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press.
- Heidegger, Martin (1927, 1962), *Being and Time*. London: SCM Press.
- Heidegger, Martin (1954), *The Question Concerning Technology*. New York: Garland Publishing.
- Kasnawi, M. Tahir dan Sulaiman Asang, “Konsep dan Pendekatan Perubahan Sosial”, <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4439-M1.pdf> (diakses, 25 Mei 2018).

- Kasus Saracen: Pesan Kebencian dan Hoax di Media Sosial “Memang Terorganisir”* (Online), <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41022914> (diakses, 7 Maret 2018).
- Keyes, Ralph (2004), *The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life*. New York: St. Martin’s Press.
- Kurniawan, Trio (2016), *Konsep Pengetahuan Personal Menurut Michael Polanyi* [skripsi diterbitkan]. Malang: STFT Widya Sasana Malang.
- Mudde, Cas (2004), ‘The Populist Zeitgeist’, *Government and Opposition*, Vol. 39(4).
- Mudde, Cas (2004), ‘The Populist Zeitgeist’, *Government and Opposition*, Vol. 39(4).
- Palmer, Joy A., ed. (2010), *50 Pemikir Paling Berpengaruh dalam Dunia Pendidikan Modern*. Yogyakarta: Laksana.
- Polisi: Berita Hoaks Muslim Cyber Army Bermotif Politik* (Online), <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43221362> (diakses, 25 Mei 2018).
- Polri: MCA Ditangkap, Hoax Penyerangan Ulama Turun Drastis* (Online), <http://news.liputan6.com/read/3344852/polri-mca-ditangkap-hoax-penyerangan-ulama-turun-drastis> (diakses, 7 Maret 2018).
- Relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief* (Online), <https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth> (diakses, 7 Maret 2018).
- Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto, eds. (2005), *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tesich, Steve (1992), “The Government of Lies”, *The Nation*, 6 January.
- Word of the Year 2016 is...* (Online), <https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016> (diakses, 7 Maret 2018).
- Wuthnow, Robert, James Davidson Hunter, Albert Bergesen, and Edith Kurzweil (1984), *Cultural Analysis: The Work of Peter L Berger, Mary Douglas, Michel Foucault and Jürgen Habermas*. Boston: Routledge & Kegan Paul.